

KAJIAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PETANI DI SUB DAS SUMPUR SINGKARAK

STUDY OF THE SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF FARMING COMMUNITIES IN THE SUMPUR SINGKARAK SUB-WATERSHED

EDWIN

Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas
edwinanas@gmail.com

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat petani, khususnya pada tanaman hortikultura dan perkebunan di Sub DAS Sumpur Singkarak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Penelitian ini dilaksanakan di Sub DAS Sumpur Singkarak, secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dimana teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi dan kuesioner. Jumlah responden penelitian sebanyak 32 orang, penetapan responden digunakan teknik purposif. Metode yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 61 /Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 60,78% petani responden menghasilkan komoditi pertanian hortikultura, pekebun 30,43% dan padi sawah sebanyak 8,7%. Sebanyak 61,90% responden memiliki luas lahan 0-0,5 Ha, 28,57% responden memiliki luas lahan 1,51-2 Ha dan sisanya memiliki lahan 0,51-1 Ha sebanyak 9,52% responden. Sekitar 76,19% responden berpendapatan di bawah UMR Sumatera Barat. Sawi, cabe, tomat, jahe, dan sayuran merupakan komoditi unggulan usahatani hortikultura, dan perkebunan komoditi unggulannya adalah sawo, kayu manis, kopi, coklat, cengkeh, dan kelapa. Tekanan penduduk pada lahan pertanian hortikultura berada pada kelas rendah dengan nilai indeks $0,5 < IKL \leq 1,0$, pada lahan perkebunan berada pada kelas sangat rendah dengan nilai indeks $IKL \leq 0,5$. Tiga nagari memiliki aturan pengelolaan DAS yang dikeluarkan oleh pemerintah nagari dalam bentuk peraturan nagari, lima nagari aturan yang digunakan dalam bentuk norma/nilai-nilai dan pada umumnya dipraktekkan oleh sebahagian masyarakat nagari

Kata Kunci : Tekanan penduduk, penegakkan aturan, komoditi lokal, petani.

ABSTRACT: This study aims to assess the socio-economic conditions of the farming community, especially for horticultural crops and plantations in the Sumpur Singkarak sub-watershed. The research method used is a survey method. This research was conducted in the Sumpur Singkarak sub-watershed, administratively including the Tanah Datar Regency and Padang Panjang City. The data used are secondary data and primary data, where the data collection techniques are documentation and questionnaires. The number of research respondents was 32 people, the determination of the respondents used a purposive technique. The method used refers to the Regulation of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia Number: P. 61 / Menhut-II / 2014 concerning Monitoring and Evaluation of Watersheds. The conclusion of this study is that 60.78% of respondent farmers produce horticultural agricultural commodities, 30.43% of farmers and 8.7% of lowland rice. As many as 61.90% of respondents have a land area of 0-0.5 Ha, 28.57% of respondents have a land area of 1.51-2 Ha and the rest have land 0.51-1 Ha as many as 9.52% of respondents. Approximately 76.19% of respondents have an income below the UMR West Sumatra. Mustard greens, chilies, tomatoes, ginger, and vegetables are the main commodities of horticulture farming, and the main commodities of plantation are sapodilla, cinnamon, coffee, chocolate, cloves, and coconut. Population pressure on horticultural agricultural land is in the low class with an index value of $0.5 < IKL \leq 1.0$, on plantation land is in a very low class with an index value of $IKL \leq 0.5$. The three nagari have watershed management rules issued by the nagari

government in the form of nagari regulations, five nagari rules are used in the form of norms / values and are generally practiced by some nagari communities.

Keywords: *Population pressure, rule enforcement, local commodities, farmers*

A. PENDAHULUAN

Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan terus dilakukan untuk memacu produksi komoditas pertanian guna membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun intensifikasi dan ekstensifikasi lahan tanpa memperhatikan regulasi konservasi tanah dan air akan memperlemah dan mempercepat terjadinya degradasi lahan. Seperti kita ketahui, banyak kejadian bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang, penurunan kualitas air dan sedimentasi merupakan akibat dari upaya pertanian yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya konservasi tanah dan air. Kebutuhan manusia akan lahan meningkat dari waktu ke waktu, sedangkan luas dan daya dukung lahan yang terbatas merupakan faktor pendorong konversi fungsi DAS untuk penggunaan lain (Alansi, 2009) (Ananda & Herath, 2003). Sementara itu, pengambil keputusan di DAS umumnya mengutamakan kepentingan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti banjir dan erosi.

Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lahan di DAS Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menginginkan pengelolaan DAS yang berkelanjutan, seperti peruntukan lahan sesuai dengan peruntukan dan daya dukungnya. Lahan tidak hanya ditujukan untuk mengejar target produksi (ekonomi), tetapi juga harus memperhatikan lingkungan seperti resiko banjir dan erosi. Sehingga tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan dapat ditegakkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2012), (Kartodihardjo, Murtilaksono, & Sudadi, 2004) (Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2009) (Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2014), (Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2014). Untuk mengoptimalkan pemanfaatan DAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pemanfaatan DAS secara optimal. Optimasi seringkali dilakukan hanya untuk melihat aspek ekonomi, sedangkan aspek fisik dan lingkungan seringkali diabaikan. Salah satu Sub DAS yang paling rusak di Indonesia adalah Sub DAS Sumpur Singkarak yang merupakan salah satu sumber air dari DAS Ombilin dan Danau Singkarak.

Sub DAS Sumpur Singkarak seluas 15.478 Ha terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat (Yulnafatmawita, 2009). Daerah ini dialiri sungai bernama Sungai Aie Batanang yang sumber airnya berasal dari hulu lereng gunung Marapi dan bermuara di danau Singkarak. Bagian hulu merupakan kawasan hutan, lahan pertanian dan pemukiman. Sedangkan antara hulu dan hilir muara danau adalah pemukiman di Batipuh dan Padang Panjang (Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2015), (Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, 2015)

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu tindakan yang membutuhkan keterpaduan dalam beberapa disiplin ilmu. Pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk pengelolaan DAS yang tepat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pengelolaan DAS, karena kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi DAS termasuk di Sub DAS Sumpur Singkarak. Selain itu, pemantauan dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dapat memberikan informasi tentang ukuran kinerja kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Oleh karena itu, perlu diketahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di Sub DAS Lumpur melalui pendekatan pemantauan dan evaluasi sosial ekonomi, khususnya bagi petani hortikultura dan petani perkebunan.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana kondisi sosial ekonomi petani di Sub DAS Sumpur Singkarak, ditinjau dari aspek: tekanan penduduk, kesejahteraan penduduk, komoditas hortikultura, perkebunan dan keberadaannya. dan penegakan hukum? " Mengetahui kondisi tekanan penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk, komoditas unggulan pertanian hortikultura, perkebunan serta keberadaan dan penegakan hukum di Sub DAS Suku Singkarak.

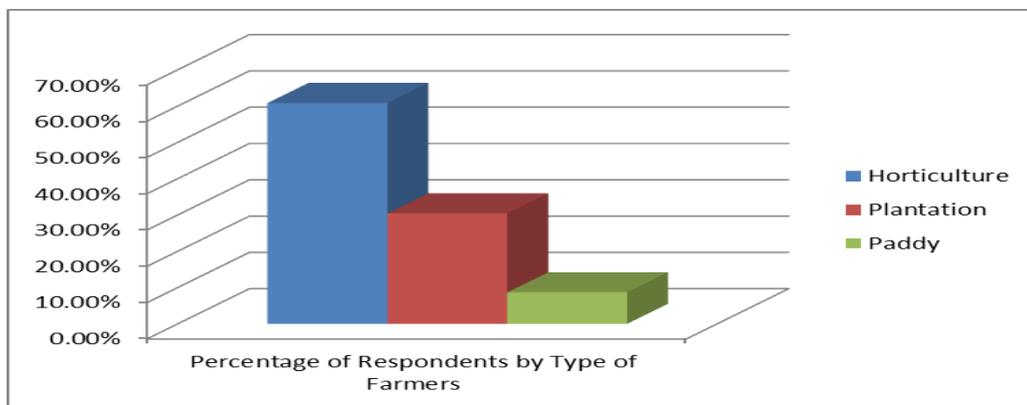
B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian survei yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Sub DAS Sumpur Singkarak, secara administratif termasuk dalam Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang tepatnya di 13 Desa (Nagari) yang terletak di sepanjang Sub DAS Sumpur Singkarak. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan teknik angket. Ada 32 responden dalam penelitian ini. Mereka adalah para petani dan penyuluh pertanian di nagari ini, yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive. Metode analisis data yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 61 / Menhut-II / 2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai (Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2014)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

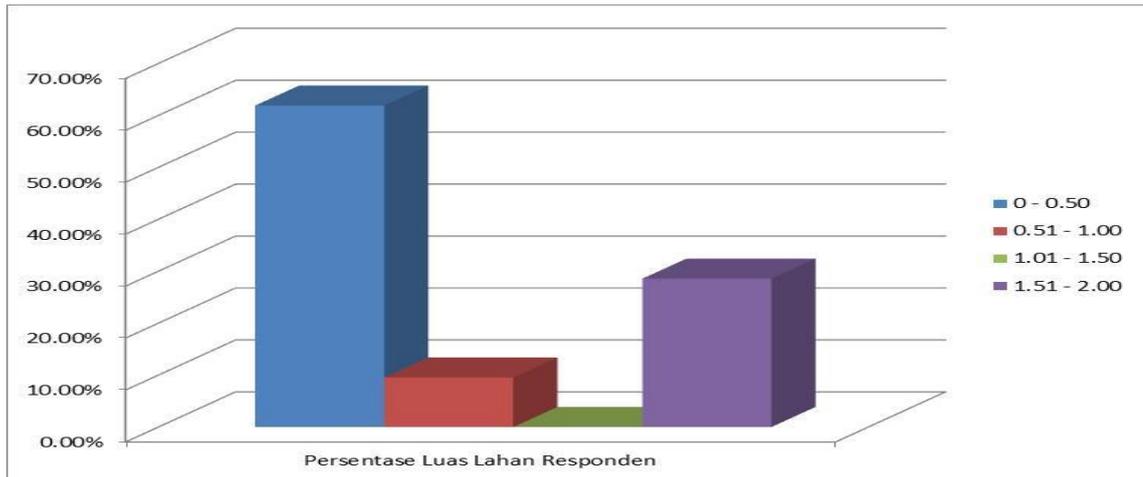
1. Kondisi Usaha Usahatani Masyarakat di Sekitar Sub DAS Sumpur Singkarak Dilihat dari Responden

Para petani di sekitar Sub DAS Sumpur Singkarak dikelompokkan menurut jenis komoditas yang mereka hasilkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian responden, terdapat tiga jenis pertanian di daerah ini yaitu hortikultura, perkebunan dan sawah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Jenis Usaha Tani di Sub DAS Sumpur Singkarak Berdasarkan Data Responden

Komoditas hortikultura yang dihasilkan antara lain cabai, bawang merah, seledri, sawi, daun bawang, ubi dan sayur mayur. Sedangkan untuk perkebunan, komoditi yang dihasilkan petani adalah sawo, karet, kakao, cengkeh, kayu manis, dan jeruk nipis. Keanekaragaman juga terlihat dari luas lahan yang dimiliki responden, seperti terlihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Persentase Luas Lahan Pertanian (Ha) Petani Responden di Aliran Sub DAS Sumpur Singkarak

Pada gambar 2 di atas terlihat bahwa yang paling banyak dari petani responden yaitu 61,90% responden memiliki luas lahan pertanian 0 s/d 0,5 Ha. Luas lahan pertanian milik petani responden terluas adalah 1,51 s/d 2 Ha, namun persentase jumlah petani responden yang memiliki lahan seluas ini hanya 28,57%. Sisa dari petani responden masing-masingnya memiliki luas lahan 0,51 s/d 1 Ha sebanyak 9,2% responden.

Mayoritas petani responden menjalankan usaha taninya secara konsisten, karena kegiatan tersebut menjadi sumber pendapatan keluarganya. Adapun sebanyak 76,19% dari responden mengkuai bahwa pendapatan yang didapat perbulannya rata-rata < Rp.1.800.725,00 sedangkan sisanya memiliki pendapatan perbulan > Rp. 1.800.725,00. Kondisi ini memperlihatkan bahwa, masih redahnya pendapatan petani di daerah aliran Sub DAS Sumpur Singkarak, karena mayoritas dari mereka masih berpendapatan dibawah standar Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Komoditi unggulan pertanian hortikultura dan perkebunan di Sub DAS Sumpur Singkarak

Masyarakat di aliran Sub Das Sumpur Singkarak mayoritas berprofesi sebagai petani. Komoditi yang dihasilkan dari kegiatan usahatani mereka cukup beragam, baik itu pertanian hortikultura maupun perkebunan. Berdasarkan data yang didapatkan dari penyuluh pertanian setempat, terdapat beberapa komoditi yang dihasilkan petani, seperti sayur-sayuran (Bawang Merah, Bawang Daun, Kol, Cabe, Cabe Rawit, Terung, Buncis, Wortel, Labu Siam, Kangkung, Bayam, sawi, dll), selanjutnya ada juga komoditi tanaman buah (tomat, durian, alpokat, durian manga, sawo), tanaman obat seperti jahe. Sedangkan komoditi perkebunan yang dihasilkan di daerah ini seperti coklat, kopi, pala, cengkeh, kulit manis, pisang, kelapa, dan akasia pera.

Dari keseluruhan komoditi di atas terdapat beberapa komoditi unggulan pertanian hortikultura yang terdapat di aliran Sub DAS Sumpur Singkarak, didapatkan beberapa komoditi unggulan yang dihasilkan oleh petani setempat yaitu sawi, cabe, dan sayur-sayuran. Pada Tabel 1 di bawah ini dapat terlihat distribusi komoditi unggulan disetiap nagari.

Tabel 1. Komoditi Unggulan Pertanian Hortikultura dan Kondisi Pendukungnya Berdasarkan Perengkingan dari Responden Penelitian di Aliran Sub DAS Sumpur Singkarak.

No	Nagari	Komoditi Unggulan	Permintaan Pasar	Daerah Pemasaran	Kondisi Harga
1.	Sumpur	-	-	-	-

2.	Koto Paninjauan	Sawi	sedang	Padang panjang padang luar	Berubah-rubah
3.	Sabu	Cabe	sedang	Padang panjang	Berubah-rubah
4.	Batipuh Atas	tomat	sedang	Padang panjang	Berubah-rubah
5.	Jaho	jahe	sedang	Padang panjang	Berubah-rubah
6.	Bungo Tanjung	-	-	-	-
7.	Batipuh Bawah	-	-	-	-
8.	Batipuh Baruah	Jahe	sedang	Padang panjang	Berubah-rubah
9.	Tj. Barulak	-	-	-	-
10.	Koto Panjang	sayuran	sedang	Padang panjang padang luar	Berubah-rubah
11.	Pitalah	-	-	-	-
12.	Ganting	sayuran	sedang	Padang panjang padang luar	Berubah-rubah
13.	Ngalau	sayuran	sedang	Padang panjang padang luar	Berubah-rubah

Sumber: hasil analisis data responden penelitian, 2016

Pada saat kondisi yang terdapat di Tabel 1 di atas kita bandingkan dengan kondisi kesesuaian lahan untuk usahatani, maka semestinya komoditi unggulan di aliran Sub DAS Sumpur Singkarak semestinya ubi jalar, kubis, terung, tomat dan pisang. Artinya, komoditi unggulan yang memang sesuai dengan kondisi lahannya, dapat membantu meningkatkan produktivitas hasil usaha tani dan berimplikasi pada peningkatan pendapatan petani.

Selain komoditi pertanian hortikultura, daerah di aliran Sub DAS Sumpur Singkarak juga memiliki komoditi unggulan pada tanaman perkebunan, seperti yang terlihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Komoditi Unggulan Perkebunan dan Kondisi Pendukungnya Berdasarkan Perengkingan dari Responden Penelitian di Aliran Sub DAS Sumpur Singkarak.

No	Nagari	Komoditi Unggulan	Permintaan Pasar	Daerah Pemasaran	Kondisi Harga
1.	Sumpur	Sawo	Tinggi	Padang Panjang dan Jakarta	Berubah-rubah
2.	Koto Paninjauan	-	-	-	-
3.	Sabu	Kayu Manis	sedang	Padang panjang	Berubah-rubah
4.	Batipuh Atas	Kelapa dan kayu manis	sedang	Padang panjang	Berubah-rubah
5.	Jaho	Kayu manis	sedang	Padang panjang	Berubah-rubah
6.	Bungo Tanjung	-	-	-	-
7.	Batipuh Bawah	-	-	-	-
8.	Batipuh Baruah	Kopi dan coklat	Tinggi	Padang panjang	Berubah-rubah
9.	Tj. Barulak	Cengkeh	Tinggi		
10.	Koto Panjang		sedang	Padang panjang	Berubah-rubah
11.	Pitalah	Coklat	Tinggi		
12.	Ganting	Kayu Manis	sedang	Padang panjang padang luar	Berubah-rubah
13.	Ngalau		sedang	Padang panjang padang luar	Berubah-rubah

Sumber: hasil analisis data responden penelitian, 2016

Pada saat dibandingkan komoditi unggulan yang ada dengan kondisi kesesuaian lahan di aliran Sub DAS Sumpur Singkarak, beberapa daerah telah memiliki komoditi perkebunan unggulan yang cocok dengan kesesuaian lahan seperti yang terdapat di Nagari Batipuh

Baruah, Sumpur, dan Batipuah Ateh. Dukungan kondisi lahan perkebunan juga berkaitan dengan tingkat produksinya, dan dapat berimplikasi terhadap pendapatan petani.

3. Kondisi Tekanan Penduduk di Sub DAS Sumpur Singkarak

Tekanan penduduk di Sub DAS Sumpur Singkarak adalah suatu hal yang perlu diketahui untuk pengelolaan lahan di aliran DASnya, karena tindakan ini dapat mengetahui besarnya kemampuan lahan pertanian di suatu wilayah yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan penduduk pada tingkat yang lebih layak (Permenhut Nomor: P.61/Menhut-II/2014). Tinggi atau rendahnya tekanan penduduk pada lahan pertanian di aliran Sub DAS Sumpur Singkarak dapat mengakibatkan penurunan sumber daya lahan dan kerusakan ekosistem DAS.

Penduduk di Sub DAS Sumpur Singkarak hanya dilihat pada enam nagari sampel saja, karena keterbatasan sumberdaya yang ada. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Indeks Ketersediaan Lahan (IKL), maka didapatkanlah kondisi tekanan penduduk pada lahan pertanian hortikultura yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Kondisi Tekanan Penduduk Pada Lahan Pertanian Holtikultura di Enam Nagari Sampel Sub DAS Sumpur Singkarak.

No	Nagari	Luas Lahan (Ha)	Jumlah KK Petani	Nilai	Kelas
1.	Gn. Rajo Batipuh - Tanah Datar	53	197	0,27	rendah
2.	Tanjung Barulak	70	401	0,17	rendah
3.	Batipuh Atas	122	256	0,48	rendah
4.	Sabu	170	425	0,4	rendah
5.	Batipuh Baruah	176	353	0,5	rendah
6.	Pitalah Batipuh	5.5	31	0,17	rendah

Sumber: hasil analisis data responden penelitian, 2016

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, tekanan penduduk pada lahan pertanian hortikultura berada pada kelas rendah. Selain itu, kondisi tekanan penduduk juga dilihat dari luas lahan perkebunan dibandingkan dengan KK petaninya yang didapatkan mayoritas dari nagari sampel tekannya berada pada kelas sangat rendah, sedangkan di Nagari baipuah Barat tekannya berada pada kelas sedang, seperti yang terdapat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Kondisi Tekanan Penduduk Pada Lahan Perkebunan di Enam Nagari Sampel Sub DAS Sumpur Singkarak.

No	Nagari	Luas Lahan (Ha)	Jumlah KK Petani	Nilai	Kelas
1.	Gn. Rajo	77	469	0,16	Sangat Rendah
2.	Tanjung Barulak	26	621	0,04	Sangat Rendah
3.	Batipuh Atas	41	120	0,34	Sangat Rendah
4.	Sabu	205	293	0,7	Sangat Rendah
5.	Batipuh Baruah	800	536	1,5	Sedang
6.	Pitalah Batipuh	25	91	0,3	Sangat Rendah

Sumber: hasil analisis data responden penelitian, 2016

4. Kondisi Tingkat Kesejahteraan Penduduk di Sub DAS Sumpur Singkarak

Diketuinya tingkat kesejahteraan penduduk di aliran Sub DAS Sumpur Singkarak, berguna untuk menggambarkan kondisi kelayakan kehidupan masyarakat dan tentunya juga akan

berimpilikasi terhadap tindakan kemauan mereka mengelola aliran Sub DAS Sumpur Singkarak. Kondisi tersebut dilihat dari persentase (%) KK miskin yang ada di daerah tersebut, khususnya pada enam nagari yang berada pada aliran SUB DAS Sumpur Singkarak, seperti yang terdapat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Tingkat Kesejahteraan Penduduk di Enam Nagari Pada Aliran Sub DAS Sumpur Singkarak.

No	Nagari	Jumlah KK	Jumlah KK miskin	Persentase (%) KK Miskin	Kelas
1.	Gn. Rajo	615	213	37	Sangat buruk
2.	Tanjung Barulak	1219	297	24	Buruk
3.	Batipuh Atas	4406	304	7	Baik
4.	Sabu	762	142	18	Sedang
5.	Batipuh Baruah	1993	119	6	Baik
6.	Pitalah Batipuh	164	135	80	Sangat buruk

Sumber: hasil analisis data responden penelitian, 2016

Berdasarkan Tabel 5 di atas terlihat bahwa Nagari Batipuh Atas dan Batipuh Baruah, kondisi kesejahteraan penduduknya berada pada kelas baik, karena persentase KK miskinnya masing-masing 7% dan 6%. Terdapat satu nagari yang berada pada kelas sedang dengan persentase 18% yaitu Nagari Sabu. Sisanya adalah nagari yang tingkat kesejahteraan penduduknya berada pada kelas sangat buruk dan buruk yaitu Nagari Gunung Rajo (37%), Nagari Pitalah (80%), dan Nagari Tanjung Barulak (24%).

5. Kondisi Keberadaan dan Penegakan Hukum untuk pengelolaan Sub DAS Sumpur Singkarak

Pengelolaan aliran Sub DAS Sumpur Singkarak membutuhkan landasan hukum yang dapat menjadi acuan oleh masyarakat untuk melaksanakannya. Landasan hukum yang dimaksudkan dapat saja berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh kelembagaan lokal, pemerintah nagari, atau landasan hukum yang tidak tertulis seperti norma dan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat. Pada Tabel 6 di bawah ini, dapat dilihat keberadaan landasan hukum pengelolaan aliran Sub DAS Sumpur Singkarak.

Tabel 6. Keberadaan Landasan Hukum/Aturan Pengelolaan Aliran Sub DAS Sumpur Singkarak di 13 Nagari Sampel.

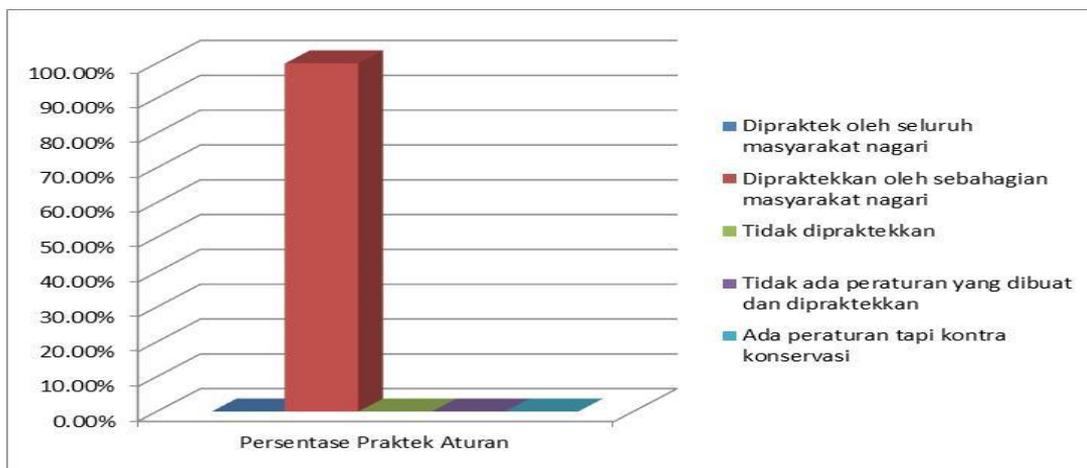
No	Nagari	Keberadaan Aturan		Bentuk Aturan	
		Ada	Tidak Ada	Peraturan Nagari	Norma/nilai-nilai
1.	Sumpur	√	-	√	
2.	Koto Paninjauan	√	-	-	√
3.	Sabu	√	-	-	√
4.	Batipuh Atas	√	-	-	√
5.	Jaho	√	-	√	-
6.	Bungo Tanjung	-	√	-	-
7.	Batipuh Bawah	-	√	-	-
8.	Batipuh Baruah	√	-		√
9.	Tj. Barulak	√	-	√	-
10.	Koto Panjang	-	√	-	-
11.	Pitalah	√	-	-	√

12.	Ganting	-	√	-	-
13.	Ngalau	-	√	-	-

Sumber: Ringkasan pengisian kuesioner penelitian, 2016.

Data di atas memperlihatkan bahwa delapan nagari telah memiliki aturan pengelolaan aliran Sub DAS Sumpur Singkarak, sisanya lima nagari tidak memilikinya. Dari delapan nagari tersebut, tiga diantaranya yaitu Nagari Sumpur, Nagari jaho, dan Nagari Tanjung Barulak, memiliki aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah nagari dalam bentuk peraturan nagari. Lima nagari lainnya, seperti Nagari Koto Paninjauan, Nagari Sabu, Nagari Batipuah Atas, Nagari Batipuah Baruah, dan Nagari Pitalah, aturan yang digunakan dalam bentuk norma/nilai-nilai yang ditanamkan oleh masyarakat setempat untuk bersama-sama menjaga dan mengelola aliran Sub DAS Sumpur Singkarak.

Keseluruhan aturan tersebut, tidak cukup ada saja namun juga harus diterapkan oleh masyarakat. Pada gambar di bawah ini terlihat kondisi penerapan aturan hukum yang sudah ada.



Gambar 3. Persentase Penerapan Aturan Pengelolaan Aliran DAS Sumpur Singkarak Delapan Nagari Yang Telah Memilikinya.

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa keseluruhan nagari yang telah memiliki aturan pengelolaan aliran Sub DAS Sumpur Singkarak, baik dalam bentuk peraturan nagari atau norma/nilai-nilai, dipraktekkan oleh sebahagian masyarakat nagari atau dipraktekkan terbatas. Kondisi ini memosisikannya pada kelas baik, karena peraturan tersebut memang benar ada, namun hanya sebahagian masyarakat nagari saja yang menerapkan aturan tersebut.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

- 1) Mayoritas dari petani responden melakukan usaha tani hortikultura yaitu sekitar 60,78% dan sisanya adalah petani pekebun 30,43% serta petani padi sawah sebanyak 8,7%. Luas lahan pertanian yang dimiliki oleh petni responden kebanyakan berada pada 0-0,5 Ha (61,90%), selanjutnya terdapat juga petani yang memiliki luas lahan sebanyak 1,51-2 Ha (28,57%) dan sisanya memiliki luas lahan 0,51-1 Ha (9,52%). Pendapatan petani tiap bulannya dari kegiatan usahatninya

mayoritas (76,19%) responden petani masih rendah dari standar Upah Minimum Regional (UMR) Sumatera Barat, yaitu < Rp.1.800.725,00.

- 2) Komoditi unggulan pertanian hortikultura yang terdapat di nagari lokasi kajian diantaranya adalah sawi, cabe, tomat, jahe, dan sayuran. Sedangkan untuk komoditi perkebunan, komoditi unggulannya adalah sawo, kayu manis, kopi, coklat, cengkeh, dan kelapa.
- 3) Tekanan penduduk pada lahan pertanian hortikultura berada pada kelas rendah dengan nilai indeks $0,5 < IKL \leq 1,0$. Selain itu, kondisi tekanan penduduk juga dilihat dari luas lahan perkebunan dibandingkan dengan KK petaninya yang didapatkan mayoritas dari nagari sampel tekannya berada pada kelas sangat rendah dengan nilai indeks $IKL \leq 0,5$, sedangkan di Nagari baipuah Barat tekannya berada pada kelas sedang dengan nilai indeksnya $1,0 < IKL \leq 2,0$.
- 4) Tingkat kesejahteraan penduduk di Nagari Batipuah Atas dan Batipuah Baruah berada pada kelas baik, dengan persentase KK miskinnya masing-masing 7% dan 6%. Terdapat satu nagari yang berada pada kelas sedang dengan persentase 18% yaitu Nagari Sabu. Sisanya adalah nagari yang tingkat kesejahteraan penduduknya berada pada kelas sangat buruk dan buruk yaitu Nagari Gunuang Rajo (37%), Nagari Pitalah (80%), dan Nagari Tanjung Barulak (24%).
- 5) Delapan nagari dari tiga belas nagari sampel telah memiliki aturan pengelolaan aliran Sub DAS Sumpur Singkarak, tiga diantaranya yaitu Nagari Sumpur, Nagari jaho, dan Nagari Tanjuang Barulak, memiliki aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah nagari dalam bentuk peraturan nagari. Lima nagari lainnya, seperti Nagari Koto Paninjauan, Nagari Sabu, Nagari Batipuah Atas, Nagari Batipuah Baruah, dan Nagari Pitalah, aturan yang digunakan dalam bentuk norma/nilai-nilai. Aturan yang telah dibuat pada umumnya dipraktekkan oleh sebahagian masyarakat nagari.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari penelitian ini, maka disarankan:

- 1) Pemerintah daerah supaya dapat mendorong pemerintah nagari dan masyarakatnya menyusun aturan pengelolaan aliran Sub DAS Sumpur Singkarak, karena merupakan acuan dan landasan yang dapat digunakan untuk menjaga lahan yang ada disekitarnya.
- 2) Masih ditemukannya nagari yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakatnya berada pada kelas sangat buruk dan buruk, oleh karena itu perlu upaya pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan khususnya pada sektor pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan dari petani. Hal ini berkaitan dengan memudahkannya untuk mengajak masyarakat menjaga dan mengelola lahan di sekitar aliran Sub DAS Sumpur Singkarak.
- 3) Pada penyuluh pertanian setempat, supaya dapat melakukan penyuluhan tentang kesesuaian lahan dengan jenis komoditi yang diusahakan oleh petani. Kondisi tersebut berkaitan dengan tingkat produktivitas usahatani dan berimplikasi pada peningkatan pendapatan petani

F. DAFTAR PUSTAKA

- Alansi, A. (2009). The Effect of Development and Land Use Change on Rainfall-Runoff and Runoff-Sediment Relationships Under Humid Tropical Condition : Case Study of Bernam Watershed Malaysia. *European Journal of Scientific Research*, 31, 88-105.
- Ananda, J., & Herath, G. (2003). Soil erosion in developing countries: a socio-economic appraisal. *Journal of environmental Management*, 68, 343-353.
- Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar. (2015). *Tanah Datar Dalam Angka 2015*. Batu Sangkar: Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang. (2015). *Padang Panjang Dalam Angka 2015*. Padang Panjang: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang.
- Djaenudin, D. H. (2011). *Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian (Kedua ed.)*. Bogor: : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan. Sumberdaya Lahan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Kartodihardjo, H., Murti Laksono, K., & Sudadi, U. (2004). *Institusi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Konsep dan Pengantar Analisis Kebijakan*. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia. (2009). *Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Nomor: SK.328/Menhut-II/2009 Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Dalam Rangka Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia. (2014). (2014). *Peraturan Menteri Kehutanan No.P. 60 /Menhut-II/2014, Kriteria Penetapan Klasifikasi Daerah Aliran Sungai*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.61/Menhut_II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Muslich, M. (2009). *Metode Pengambilan Keputusan Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pawitan, H. (2015). *Perubahan Penggunaan Lahan dan Pengaruhnya Terhadap Hidrologi Daerah Aliran Sungai; Land Use Changes and Their Impacts on Watershed Hydrology*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37. Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Yulnafatmawita. (2009). *Kajian Sifat Fisika Tanah Sub Das Aia Batanang DAS Sumpur Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar*. Padang: Fakultas Pertanian Universitas Andalas.